PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh 25/29 BADAN
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2012-2016)

THE INFLUENCE TAX AUDITS AND TAX COLLECTION ON INCOME TAX RECEIPTS 25/29 CORPORATE TAXPAYERS
(Case Study On The Tax Office Pratama Majalaya Period 2012-2016)

Oleh:
Yuanita Retno Wulandari
21113100
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia
e-mail: wulandariyuanita@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study is based on the phenomenon that occurs in the tax examination was still high namely the Letter of Tax Underpayment was caused by low awareness of taxpayers in paying tax so that in tax revenue there was still acceptance doesn't reach the target and that occured in the tax collection was letter issue contained warning caused by the low compliance of taxpayers so that in tax revenue there is still acceptance that does not reach the target.

The purpose of this study was to determine the influence of tax audit and tax collection on the corporate income tax revenue 25/29. In this study used descriptive and verification method with quantitive approach. Data was analyzed statistically by using multiple linear regression analysis,correlation analysis, determinant coefficient analysis and hypotesis test(t test).

The result of this study indicated a strong influence of tax audit on corporate income tax revenues 25/29 and tax collection on corporate income tax revenue 25/29.

Keywords : tax audit, tax collection, corporate income tax revenue 25/29

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Simanjuntak & Mukhlis, 2012:30). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara setiap tahun pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan suatu negara. (Mukhlis & Simanjuntak, 2011). Realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak (Suparmono & Theresia, 2010:1)

Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efesien (Suryadi, 2006:8).Usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Menurut (Simanjuntak, 2012) Efektivitas penerimaan pajak menghadapi tantangan berat dan untuk itu tindakan antisipasi benar-benar harus menjadikan pelanggar aturan menjadi jera. Penegakan Hukum (*law enforcement*) menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana fiskal. Mencegah *tax evasion* salah satu upaya yang dilakukan dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*) (Siti Kurnia, 2010 : 245). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Djoko Muljono,2010:125).

Mendukung pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan yang bertujuan mengamankan penerimaan pajak nasional, perlu adanya peningkatan intensitas penagihan pajak secara persuasif maupun represif, termasuk pelaksanaan penyanderaan pajak. Selain dari tindakan penagihan pajak dengan paksaan langsung dalam perpajakan dikenal juga paksaan yang bersifat tidak langsung antara lain yang berbentuk penyanderaan (Haula Rosdiana, Edi Slanmet Irianto, 2011).Penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketikan dan sekaligus, memberitahu Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, menjual barang yang telah disita. (Mardiasmo, 2009:119)**.**

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil judul **"Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Badan".**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan.
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan pada KPP Pratama Majalaya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan
2. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis (*Applied Research*)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya serta meningkatkan proses penagihan pajak agar penerimaan pajak dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

1.4.2 Kegunaan Akademis (*Base Research*)

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan.

2. Bagi Perkembangan Ilmu

Dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Resmi adalah:

"Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

(2014 : 20)

2.1.1.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010: 323)** adalah Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dari yang telah dijelaskan diatas penulis memilih indikator untuk pemeriksaan pajak adalah peneribitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Menurut **Siti Resmi (2014: 48)** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut Djoko Muljono adalah :

" Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara Menegur atau memperingatkan, Memberitahu Surat Paksa, Mengusulkan Pencegahan, Melaksanakan Penyitaan, Melaksanakan Penyanderaan, Menjual barang yang telah disita".

(2010 : 158)

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak

Menurut **Djoko Muljono (2010 : 158)** yang telah dijelaskan diatas bahwa untuk menagih pajak dengan cara menegur, memberi surat paksa, melaksanakan penyitaan dan menjual barang yang telah disita.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut **Rimsky K.** adalah :

"Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik".

(2005 : 4)

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut **John Hutagol (2007 : 325)** indikator penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut **Erly Suandy (2011:101)** adalah

"Pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Menurut **Gatot S.M. Faisal (2009:35)** adalah

"Target penerimaan pajak ditetapkan melalui undang-undang APBN yang ditetapkan wakil rakyat tiap tahun, sementara perangkat hukum untuk merealisasikan atau untuk menarik pajak adalah seperangkat undang-undang perpajakan. Kegiatan administrasi pajak melakukan kegiatan pengawasan dengan menjalankan undang-undang pajak disebut sebagai aktivitas penegakan hukum (*law enforcement*). Pengawasan administrasi pajak mewujud dalam aktivitas pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak".

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut **Soemarso.S.R (2007:13) adalah**

"Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi. Pada dasarnya, penagihan berkaitan dengan tindakan memaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang utama yaitu membayar pajak".

Menurut **Gatot S.M. Faisal (2009:35)** adalah

"Target penerimaan pajak ditetapkan melalui undang-undang APBN yang ditetapkan wakil rakyat tiap tahun, sementara perangkat hukum untuk merealisasikan atau untuk menarik pajak adalah seperangkat undang-undang perpajakan. Kegiatan administrasi pajak melakukan kegiatan pengawasan dengan menjalankan undang-undang pajak disebut sebagai aktivitas penegakan hukum (*law enforcement*). Pengawasan administrasi pajak mewujud dalam aktivitas pemeriksaan,penyidikan, dan penagihan pajak".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui proposisi yang ada dalam paradigma penelitian, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan

H2: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian yang Digunakan

Menurut **Sugiyono (2012:2)** mengemukakan bahwa :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif menurut **Sugiyono (2014:13)** adalah:

"Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan."

Dalam melaksanakan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif menggunakan SPSS, kemudian diolah dan dianalisis kembali untuk diambil kesimpulan .

Pengertian penelitian deskriptif menurut **Imam Ghozali (2016:19)**

"Penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata".

Sedangkan definisi penelitian verifikatif menurut **Juliansyah Noor (2012:20):**

"Penelitian verifikatif dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya kerugian terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu."

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.. Adapun pengertian unit analisis menurut **Hamidi (2012:75)** adalah:

"Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau satuan latar peristiwa soasial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian".

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa satuanindividu, kelompok, sebagai subjek penelitian , dan data tersebut dapat digunakan untuk penelitian dan unit observasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian Penerimaan PPh 25/29 Badan dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. maka variabel-variabel yang akan diteliti dapat dibedakan atas dua variabel, yaitu:

1) Variabel *Independent* (Variabel X_1)
   Variabel *independent* atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel *independen* pertama dalam penelitian ini adalah "Pemeriksaan Pajak".
2) Variabel *Independent* (Variabel X_2)
   Yaitu variabel yang ikut mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel lain dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel *independent* kedua dalam penelitian ini adalah "Penagihan Pajak".
3) Variabel *Dependent* (Variabel Y)
   Variabel *dependent* atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau yang menjadi akibat karena adanya variabel *independent* (bebas). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel *dependent* adalah "Penerimaan PPh 25/29 Badan".

Untuk memperjelas mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut **Suharsimi Arikunto (2013:172)** data sekunder yaitu:

"Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua, biasanyadiperoleh melalui instansi yang bergerak dibidang pengumpulan data seperti adan Pusat Statistik dan lain-lain".

Sumber Data yang digunakan adalah sekunder, dan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Sugiyono (2013:224):**

"Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, kepustakaan dan dokumentasi.

Menurut **Esterberg dalam Sugiyono (2013:231)**:

"Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu".

Menurut **Sugiyono (2013:240):**

"Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang".

Menurut **Sugiyono (2013:224):**

"Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperoleh data ataupun teori yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitiaanya. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan membaca, mempelajari berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku-buku, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang erat

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas penulis, sehingga dapat membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan penelitian ini".

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut **Sugiyono (2011:80)**, pengertian populasi adalah sebagai berikut:
"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".
Berdasarkan pengertian populasi yang dikemukakan oleh para ahli diatas disimpulkan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dalam populasi dimana sampel diambil oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah data perbulan sebanyak 60, mengenai Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Nominal Surat Teguran, dan Jumlah Penerimaan PPh 25/29 Badan pada KPP Pratama dari tahun 2012 sampai 2016

3.4.2 Sampel

Menurut **Tony Wijaya (2013:27)** sampel didefinisikan sebagai berikut:
"Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil/ ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu."
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi.
Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah Sampling Jenuh. Pengertian Sampling Jenuh menurut **Sugiyono (2010:124)** yaitu:
"Sampling Jenuh yaitu teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel."
Dengan menggunakan Sampling Jenuh yaitu karena dalam penelitian ini didasarkan pada seleksi khusus dengan pertimbangan tertentu dan sesuai dengan tujuan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 60 jumlah sampel dengan unit data perbulan selama 2012 sampai 2016, mengenai Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Jumlah Surat Teguran, dan Jumlah Penerimaan PPh 25/29 Badan pada KPP Pratama.

3.5 Metode Pengujian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain, maka metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik.
Didalam penggunaan analisis linier berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik. Beberapa asumsi klasik regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

a. Uji Normalitas

Menurut **Imam Ghozali (2011:163)** tujuan uji normalitas adalah:
"Untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali".

b. Uji Multikolinieritas

Menurut **Imam Ghozali (2011:105)** tujuan uji multikolonieritas adalah:
"Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol".

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut **Imam Ghozali (2013:139)** menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas adalah:

"Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas".

d. Uji Autokolerasi

Menurut **Imam Ghozali (2011:110)** menyatakan bahwa uji autokolerasi adalah:

"Untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnnya)".

3.5.1 Analisis Regresi Berganda

Menurut **Albert Kurniawan (2010:52)** mendefinisikan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

"Pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari atau lebih variabel *independent*/bebas dan 1 variabel *dependent*/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*)".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pemeriksaan Pajak Badan dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penguraian serta menganalisis data yang diperoleh mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan jenis data yang dikumpulkan maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak yang telah terkumpul sehingga dari data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan sedangkan analisis verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak.

4.1.1 Analisis Korelasi

Analisis koefisien korelasi *pearson* digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Penagihan Pajak(X_2) serta Penerimaan Pajak (Y). Korelasi ini digunakan karena teknik statistik ini paling sesuai dengan jenis skala penelitian yang digunakan rasio.

a. Korelasi Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Penerimaan PPh 25/29 Badan

Hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0.785 dengan arah positif. Artinya Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak ketika tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Pemeriksaan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak akan meningkat pula.

b. Korelasi Antara Penagihan Pajak Dengan Penerimaan PPh 25/29 Badan

Hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,794 dengan arah positif. Artinya Penagihan Pajak memiliki hubungan yang tinggi dengan penerimaa pajak. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Penagihan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat.

4.1.2 Koefisien Determinasi

Koefsien pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel "X_1" Pemeriksaan Pajak dengan "Y" Penerimaan Pajak serta variabel "X_2" Penagihan Pajak dengan "Y" Penerimaan Pajak. Dari hasil perhitungan secara parsial di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh

variable X_1 terhadap Y yaitu sebesar 37,76% kemudian diikuti dengan Pengaruh X_2 terhadap Y yaitu sebesar 39,94%.

4.2 Pembahasan

Setelah dilakukan beberapa pengujian dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini mengenai hasil pengujian untuk variabel Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan.

4.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah 37,76%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis parsial menunjukan nilai t_{hitung} jatuh didaerah penolakan H_0 (t_{hitung} 6, 120< t_{tabel} 2,002) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1, artinya secara parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak .

Hasil pengujian hipotesis ini didukung teori sebelumnya yang mengatakan **Erly Suandy (2011:101)** Pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak menunjukan hubungan positif, artinya apabila ada peningkatan Pemeriksaan Pajak, maka akan mempengaruhi peningkatan Penerimaan Pajak yang didapatkan.

4.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan, besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah 39,94%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis parsial menunjukan nilai t_{hitung} jatuh didaerah penolakan Ho (t_{hitung} 6,398 < t_{tabel} 2,002) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1, artinya secara parsial Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan perhitungan dari tingkat signifikan dapat dilihat bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ini didukung teori sebelumnya yang mengatakan Menurut **Soemarso.S.R (2007:13)** Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi. Pada dasarnya, penagihan berkaitan dengan tindakan memaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang utama yaitu membayar pajak.

Hubungan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak menunjukan hubungan positif, artinya apabila ada peningkatan Penagihan Pajak, maka akan mempengaruhi peningkatan Penerimaan Pajak yang didapatkan.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis dan hasil analisis data mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan. Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Penerimaan PPh 25/29 Badan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan. Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Penerimaan PPh 25/29 Badan

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

1. Agar Penerimaan Pajak PPh 25/29 Badan semakin optimal maka dari segi Pemeriksaan Pajak disarankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya untuk terus melakukan evaluasi kepada Wajib Pajak Badan sehingga para Wajib Pajak Badan yang telah melakukan kesalahan tidak mengulanginya sehingga target untuk penerimaan dapat tercapai.

2. Agar Penerimaan Pajak PPh 25/29 Badan semakin optimal maka dari segi Penagihan Pajak disarankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya untuk lebih tegas terhadap Wajib Pajak Badan agar mereka dapat dengan tepat waktu membayar pajak selain itu pula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya lebih meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak Badan tentang pentingnya membayar pajak. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan secara langsung pada saat Wajib Pajak Badan melakukan pelaporan atau juga dapat dilakukan melalui media, baik media elektronik maupun cetak.

b) Bagi Wajib Pajak

1. Agar Pemeriksaan Pajak lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak maka wajib pajak diharapkan taat terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga semunya dapat berjalan lancar.

2. Agar Penagihan Pajak berjalan lancar khususnya dalam hal surat teguran diharapkan para wajib pajak taat terhadap aturan tersedia dan membayar kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo.

5.2.2 Saran Teknis

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih jauh dari sempurna namun diharapkan dapat menjadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait judul ini yang telah dikaji bahwa Penerimaan PPh 25/29 Badan dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Selain itu peneliti berikutnya diharapkan untuk dapat menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori serta konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

2. Bagi Perkembangan Ilmu

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi Perpajakan dan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25/29 Badan.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib Pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah bahwa laporan Pemeriksaan Pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu nominal dari	- Nominal SKPKB **Siti Kurnia Rahayu (2010: 323), Siti Resmi (2014: 48)**	Rasio

	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) **Siti Kurnia Rahayu (2010: 323)**		
Penagihan pajak (X2)	Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara Menegur atau memperingatkan, Memberitahu Surat Paksa, Mengusulkan Pencegahan, Melaksanakan Penyitaan, Melaksanakan Penyanderaan, Menjual barang yang telah disita **Djoko Muljono (2010 : 158)**	- Nominal Surat Teguran **Djoko Muljono (2010 : 158), Siti Kurnia Rahayu (2010 : 197)**	Rasio
Penerimaan Pajak PPh 25/29 Badan (Y)	"Penerimaan Pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat" **John Hutagol (2007 : 325)**	Nominal penerimaan pajak. **John Hutagol (2007 : 325)**.	Rasio

DAFTAR PUSTAKA

Albert Kurniawan. 2010. *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula.* Yogyakarta: Mediakom.

Djoko Muljono. 2010,. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, ANDI : Yogyakarta

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak,* Salemba

Gatot F. 2009. *How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak*, Jakarta :Grasindo

Hamidi. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang : UMM Press

Haula Rosdiana, Edi Slanmet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap, Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, Visimedia

Imam Ghozali. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS".* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Imam Ghozali. 2013. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS".* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Imam Ghozali. 2016. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS".* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Konteporer*, Graha Ilmu

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis dan Diserati Karya Ilmiah*. Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana Prenada Media

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit. Andi.

Mukhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2011. *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. Maksi*.

Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*, Gramedia pustaka utama : Jakarta

Simanjuntak & Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan,* Depok : Raih Asa Sukses

Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu : Yogyakarta

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Salemba

Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan komprehensif* . Jakarta : Salemba Empat.

Suharsimi Arikanto.2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011,.*"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*, Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis Teori & Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu